



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Periode pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantikny Gubenur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah yang akan dimulai pada tahun 2025, beririsan dengan pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap penyelarasan kembali dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan nasional Presiden terpilih serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sector unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang selanjutnya menjadi dasar perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Penyelenggaraan kebijakan di dalam dokumen RPJMD, dilaksanakan melalui Renstra PD, sehingga penyusunan RPJMD bersamaan dengan penyusunan Renstra PD. Renstra PD ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyusunan Renstra PD dilakukan secara transparan, efektif, efisien, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*), serta berbasis risiko (*riskbased planning*).

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui tahapan sebagai berikut: 1) Tahap I meliputi: penyusunan pohon kinerja, cascading, dan manajemen risiko Perangkat Daerah; 2) Tahap II penyusunan dokumen Renstra PD yang meliputi: analisis gambar pelayanan; analisis permasalahan, penelaahan dokumen dan perencanaan lainnya; analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran PD beserta indikator serta target kinerja; perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD; 3) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD; 4) Perumusan rancangan akhir 5) Penyampaian Rancangan Akhir Renstra PD dan Verifikasi ke BAPPEDA; 6) Penyempurnaan Renstra PD hasil verifikasi; dan 7) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Substansi yang tertuang pada Renstra PD adalah sebagai berikut: 1) Tujuan dan sasaran Renstra PD harus selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2) Penentuan tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan pun harus selaras dengan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*) Renstra PD dari hasil evaluasi

RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024, Hasil evaluasi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan tahun 2024, isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah, Kebijakan nasional, Regulasi yang berlaku, Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

Guna menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dimana di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah menjabarkan secara rinci tujuan, sasaran serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang berikut strategi dan kebijakan yang akan diambil. Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan sehingga program dan kegiatan yang akan disusun diharapkan tidak menyimpang dari perencanaan yang ada dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah menginterpretasikan visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ke dalam Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, guna menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

- pengawasan Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029;
2. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan para stakeholder pelayanan;
 3. Sebagai pedoman penyelenggaraan Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam dokumen Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 serta;
 4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	Berisi Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat daerah, Sumber daya perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, Permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis perangkat daerah;
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
	Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta manajemen risiko strategis perangkat daerah;
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan perangkat daerah;
BAB V	Penutup
	Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut;
LAMPIRAN	
	Berisi pohon kinerja perangkat daerah, cascading perangkat daerah, dan manajemen risiko perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya menyejahterakan masyarakat memerlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah tersebut dipengaruhi perekonomian global, nasional dan daerah, kinerja keuangan di masa lalu, serta regulasi maupun kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan keuangan daerah diharapkan sumber daya ekonomi milik daerah dapat digunakan secara tepat dan setiap rupiah uang daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 dapat digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020–2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	25.393.735.934	26.633.000.085	24.167.935.634	25.369.733.556	26.378.719.626
PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.668.282.278	14.695.474.898	16.264.618.853	17.012.509.421	17.650.936.913
Pajak Daerah	11.139.173.309	11.718.378.320	13.484.851.151	13.976.642.716	14.210.241.533
Retribusi Daerah	98.297.991	91.634.269	115.158.014	139.377.038	2.318.821.514
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	530.091.029	508.263.876	546.717.104	638.482.406	687.813.166
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.900.719.948	2.377.198.431	2.117.892.583	2.258.007.259	434.060.698
PENDAPATAN TRANSFER	11.702.101.655	11.871.796.336	7.810.882.578	8.278.928.086	8.701.438.866
Dana Bagi Hasil Pajak	843.392.119	768.488.755	626.671.963	601.686.290	570.985.609
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.888.016	267.356.655	302.028.750	331.425.232	325.246.959
Dana Alokasi Umum	3.438.709.973	3.432.978.859	3.435.718.090	3.558.428.755	3.819.010.791

Dana Alokasi Khusus (fisik)	350.564.240	401.885.567	371.734.785	404.100.292	473.940.472
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.983.232.690	6.932.375.674	3.013.508.989	3.296.089.570	3.474.257.466
Dana Insentif Daerah	68.212.455	68.710.605	61.352.500	87.197.945	37.997.568
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.102.159	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.352.000	65.728.851	92.434.201	78.296.049	26.343.846
Pendapatan Hibah	23.352.000	64.882.003	92.161.740	77.972.123	25.600.169
Lain-lain pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	846.848	272.461	323.925	743.676
Jumlah Pendapatan	25.393.735.934	26.633.000.085	24.167.935.634	25.369.733.556	26.378.719.626
BELANJA DAERAH	25.651.740.349	25.843.800.193	23.950.240.497	25.800.341.207	27.187.126.497
BELANJA OPERASI	16.223.988.285	16.826.577.831	13.456.887.671	14.887.780.012	16.083.865.301
Belanja Pegawai	6.483.761.623	5.685.925.255	5.902.903.886	6.362.326.855	7.023.084.524
Belanja Barang dan Jasa	4.104.637.788	5.345.399.454	5.377.369.153	5.791.112.760	6.234.228.358
Belanja Subsidi	-	90.482	4.958.884	5.350.753	1.399.999
Belanja Hibah	5.593.181.623	5.728.982.384	2.092.761.564	2.610.303.175	2.780.143.423
Belanja Bantuan Sosial	42.407.250	66.180.255	78.894.181	118.686.467	45.008.996
BELANJA MODAL	996.994.505	1.447.620.411	1.713.641.630	1.794.862.778	1.733.084.096
Belanja Modal Tanah	14.338.900	79.135.275	17.346.322	67.791.905	12.221.207
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.933.371	578.353.949	767.027.589	751.571.586	855.982.713
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.773.603	330.679.148	359.726.308	526.682.150	411.044.257
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.713.123	351.328.654	475.441.543	351.052.937	366.478.924
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.376.388	108.123.383	94.099.866	97.389.078	86.434.858
Belanja Modal Aset Lainnya	859.119	-	-	375.119	922.135
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
Belanja Tidak Terduga	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
BELANJA TRANSFER	6.646.872.581	7.497.298.646	8.763.165.716	9.116.958.416	9.359.951.298
Belanja Bagi Hasil	4.633.245.749	5.735.553.033	6.085.808.822	6.264.046.226	6.334.544.870
Belanja Bantuan Keuangan	2.013.626.831	1.761.745.612	2.677.356.893	2.852.912.190	3.025.406.428
Jumlah Belanja	25.651.740.349	25.843.800.193	23.950.240.497	25.800.341.207	27.187.126.497
Defisit	(258.004.415)	789.199.892	217.695.136	(430.607.651)	(808.406.871)
PEMBIAYAAN	1.119.409.987	646.492.992	1.018.773.865	1.330.794.071	1.385.420.547
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.119.409.987	861.492.992	1.909.773.865	1.330.794.071	1.385.420.547
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.119.409.987	861.376.784	1.435.692.146	1.236.470.622	900.186.419
Pencairan dana Cadangan	-	-	-	94.130.600	505.869.400
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	-	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	252.540	116.207	474.081.719	192.848	64.727

PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	215.000.000	891.000.000	-	20.700.000
Pembentukan dana cadangan	-	200.000.000	400.000.000	-	-
Penyertaan modal	-	15.000.000	491.000.000	-	20.700.000
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan	1.119.409.987	646.492.992	1.018.773.865	1.330.794.071	1.385.420.547

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Pada tabel 2.1, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh 2 (dua) komponen besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Pendapatan Transfer yang tercermin dari perkembangan komponen pendapatan selama rentang tahun 2020-2024. Pada masa pemulihan pasca pandemi *Covid-19* tersebut, pendapatan daerah sempat tumbuh negatif pada tahun 2022 akibat perubahan kebijakan pendapatan transfer namun demikian secara keseluruhan pendapatan daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.008 triliun atau sebesar 3,98%.

Sedangkan pada realisasi Belanja Daerah masih didominasi oleh belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan rata-rata capaian sebesar 60,33%. Selanjutnya, pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, lebih difokuskan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun sebelumnya serta pencadangan untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024. Terkait kebijakan penyertaan modal dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan usaha serta penyehatan BUMD. Sedangkan kebijakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan divestasi atas salah satu kepemilikan BUMD pada tahun 2022 serta pengembalian piutang atas program dana bergulir. Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, pembentukan dana cadangan mulai dilakukan tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Tabel 2.2
Neraca Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
ASET	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.261.948.714
ASET LANCAR	3.316.755.368	3.791.840.781	3.561.496.934	3.418.108.280	3.427.967.953
Kas dan Setara Kas	864.937.343	1.436.740.557	1.237.681.108	907.267.200	587.530.474
Piutang Pajak Daerah	2.050.129.305	2.116.395.701	2.212.266.408	2.625.886.012	2.897.664.180
Piutang Retribusi Daerah	977.885	1.188.953	265.512	86.035	111.893.619
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	157.475.313	344.393.176	58.532.786	31.181.471	1.832.728
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	128.148.979	-	14.764.276	4.254	53.079.604
Piutang Lainnya	16.031.691	15.717.526	15.599.471	15.406.623	15.157.041
Penyisihan Piutang	-418.683.863	-642.081.528	-380.010.526	-517.709.600	-560.159.696
Beban Dibayar Dimuka	6.144.929	5.756.838	5.301.065	5.799.321	5.086.493
Persediaan	511.593.784	513.729.554	397.096.831	350.191.210	315.883.508
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
Investasi Jangka Panjang Permanen	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
ASET TETAP	25.972.626.841	26.362.173.533	26.085.962.628	26.589.416.803	26.620.736.197

Tanah	13.483.227.890	13.583.627.731	13.198.047.275	13.069.880.522	12.332.651.846
Peralatan dan Mesin	6.808.241.676	7.529.773.129	8.329.364.755	9.123.265.698	9.528.039.167
Gedung dan Bangunan	7.563.815.353	7.920.921.189	8.861.709.983	9.491.863.080	9.849.541.705
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.192.168.636	10.585.831.733	11.173.745.673	11.586.304.551	12.507.048.034
Aset Tetap Lainnya	1.365.494.887	1.472.453.852	976.375.566	1.053.571.666	1.056.350.270
Konstruksi dalam Pengerjaan	737.058.609	788.310.129	242.550.742	245.302.753	287.616.819
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-14.177.380.211	-15.518.744.231	-16.695.831.367	-17.980.771.469	-18.940.511.645
DANA CADANGAN	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
Dana Cadangan	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
ASET LAINNYA	1.508.575.287	1.483.022.752	2.669.623.055	2.659.378.989	2.146.938.213
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	96.104.229	74.906.991	107.001.525	100.429.933	96.000
Aset Tak Berwujud	7.656.505	28.936.052	36.540.063	39.808.975	45.259.342
Aset Lain-lain	1.404.814.552	1.756.554.545	2.898.167.680	2.955.683.663	3.160.983.940
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-21.190.441	-25.209.487	-30.065.845	-36.070.409
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-356.184.395	-450.364.793	-504.977.410	-1.023.416.071
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	53.958	85.412
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	-	-	103.488.065	98.445.714	-
PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	137.289.923
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	122.427.169
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	35.568.943
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-20.706.189
KEWAJIBAN	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	557.443.147
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	557.443.147
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	249.993	281.977	323.256	204.401	28.310
Pendapatan Dibayar Dimuka	37.083.532	39.251.892	38.988.175	44.550.351	34.750.163
Utang Belanja	199.503.881	339.312.280	287.498.121	380.841.449	507.205.974
Utang Jangka Pendek Lainnya	587.826.391	4.423.919	11.890.395	5.734.786	15.458.698
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
EKUITAS	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	39.704.505.567
Ekuitas	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	39.704.505.567
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.261.948.714

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu. Laporan neraca akan memberikan informasi penting kepada *stakeholder* internal maupun eksternal (manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya), didalamnya adalah jenis akun riil dimana hasil operasional pada periode tersebut akan berpengaruh terhadap nilai neraca seperti besarnya aset, kewajiban yang harus dibayar dan ekuitas yang dimiliki.

Mengacu pada tabel 2.2 Neraca Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024, pada aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan

kembali sesuai dengan pencatatan aset pada pengelola dan aset pada pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) melaksanakan fungsi sebagai pejabat penatausahaan barang yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah. Adapun secara terinci dijabarkan sebagai berikut:

- a. meneliti dan menyetujui RKBMD;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan tugas Pejabat Penatausahaan Barang pada BPKAD selaku pengguna barang adalah sebagai berikut:

- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan Barang Milik Daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. membantu pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah; membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- i. menyusun laporan Barang Milik Daerah

Adapun pembagian klasifikasi pencatatan aset dimaksud sebagaimana tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3
 Klasifikasi Pencatatan Aset Tetap Berdasarkan Jenis
 Pada Pengelola Barang
 Tahun 2020 sampai dengan 2024

Kode Jenis	Keterangan Jenis	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024		TA 2025 (sd Sep 2025)	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1.3.1	TANAH	8	10.821.023.800	21	24.752.947.789	17	20.731.042.285	21	57.446.551.785	19	57.026.370.785	18	56.520.120.785
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.717	20.695.433.747	1.732	22.100.520.519	1.711	18.486.537.403	1.707	17.917.394.172	1.296	11.915.075.824	1.296	12.069.685.890
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	81	187.095.994.818	52	179.986.449.618	38	169.526.867.330	42	186.053.098.230	38	185.018.754.130	37	184.941.454.130
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.808	245.692.950.455	1.807	253.920.416.016	1.768	235.824.945.108	1.772	288.497.542.277	1.355	281.040.698.829	1.353	280.611.758.895

Sumber : SIM ASET (2025)

Tabel 2.4
Klasifikasi Pencatatan Aset Tetap Berdasarkan Jenis
Pada Pengguna Barang
Tahun 2020 sampai dengan 2024

Kode Jenis	Keterangan Jenis	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024		TA 2025 (sd Sep 2025)	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1.3.1	TANAH	10.143	13.472.406.866.559	10.475	13.558.874.783.755	10.128	13.177.316.232.743	9.877	13.012.433.970.467	8.721	12.275.625.475.215	8.764	13.232.243.290.682
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	935.739	6.787.546.242.767	1.009.121	7.507.672.609.146	1.070.582	8.310.878.218.082	1.129.619	9.105.348.303.954	1.249.074	9.516.124.091.433	1.267.801	9.641.188.074.326
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	19.682	7.376.719.358.254	19.753	7.740.934.739.582	20.185	8.692.183.115.832	20.534	9.305.809.982.374	20.784	9.664.522.951.765	20.827	9.880.062.383.270
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	15.260	10.165.088.138.546	15.541	10.558.751.235.128	15.698	11.146.665.175.102	15.099	11.559.224.053.455	14.860	12.479.967.536.320	14.874	12.699.330.000.136
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	22.020.930	1.365.494.887.464	50.689.063	1.472.453.852.706	90.521.887	976.375.566.548	120.052.554	1.053.571.666.936	141.313.771	1.056.350.270.097	144.298.641	1.090.744.956.845
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	310	737.058.609.225	297	788.310.129.085	294	242.550.742.201	292	245.302.753.445	274	287.616.819.183	273	89.371.656.542
	JUMLAH	23.002.064	39.904.314.102.815	51.744.250	41.626.997.349.402	91.638.774	42.545.969.050.508	121.227.975	44.281.690.730.631	142.607.484	45.280.207.144.013	145.611.180	46.632.940.361.801

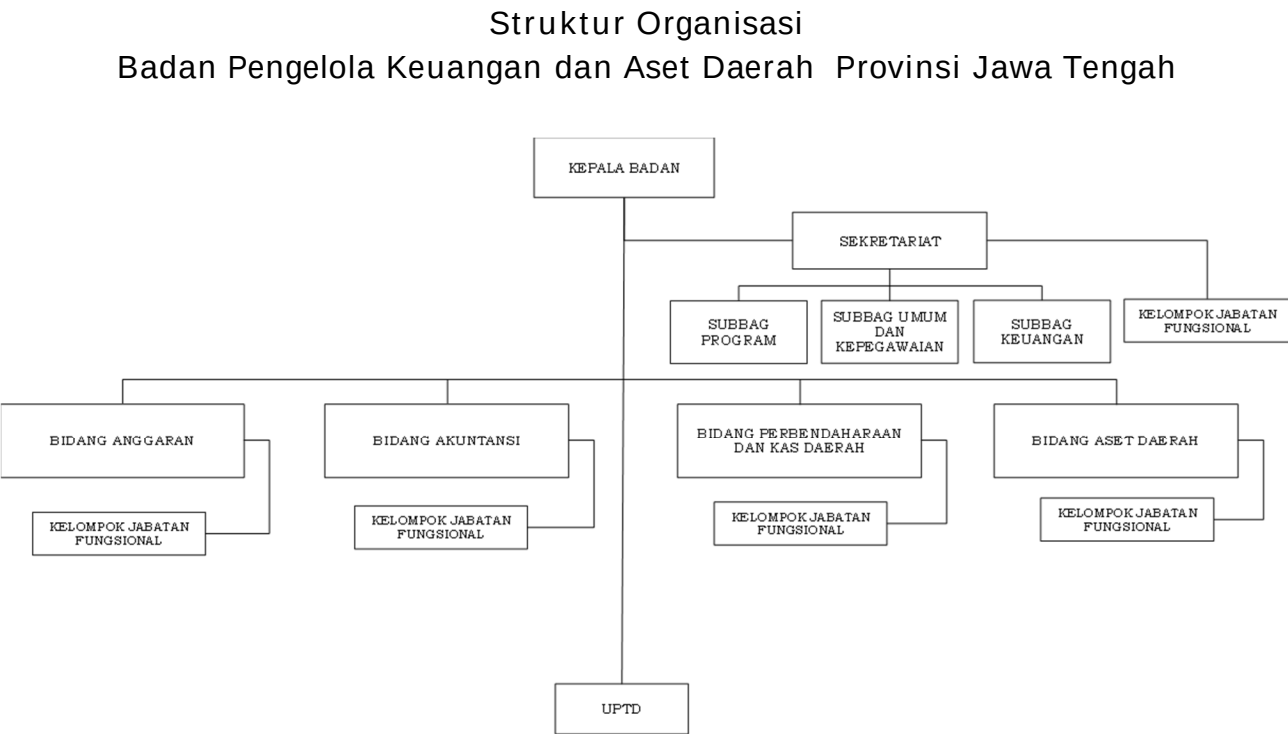
Sumber : SIM ASET (2025)

Mengacu ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
4. pembinaan teknis di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
5. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi BPKAD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri:
4. Bidang Akuntansi, terdiri:
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri:
6. Bidang Aset Daerah, terdiri:
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Asrama Donohudan Kelas B;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Bagan Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat dan Unsur Bidang serta Unit. Adapun tugas dari masing-masing unsur sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- 7) penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

b) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran melaksanakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 2) pelaksanaan kebijakan terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 4) monitoring dan evaluasi terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi

rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

- 5) pelaporan dan rekomendasi terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

- 1) Pokja Perencanaan Anggaran;
- 2) Pokja Penyusunan Anggaran; dan
- 3) Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota.

c) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 2) pelaksanaan kebijakan terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 4) monitoring dan evaluasi terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 5) pelaporan dan rekomendasi terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

- 1) Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD; dan
- 3) Pokja Evaluasi dan Informasi Data Keuangan Daerah.

d) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melaksanakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait dan pengelolaan kas daerah;
- 4) monitoring dan evaluasi terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- 5) pelaporan dan rekomendasi terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kasda dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

- 1) Pokja Penatausahaan Keuangan;
- 2) Pokja Pengelolaan Kas Daerah; dan
- 3) Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan.

e) Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset Daerah melaksanakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah;
- 4) monitoring dan evaluasi terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah; dan
- 5) pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

- 1) Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
- 2) Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah; dan

- 3) Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah.
- f) UPTD Pengelola Asrama Donohudan Kelas B

UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B, bertugas melakukan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan di Bidang Pengelolaan Asrama Donohudan. Tugas dimaksud, meliputi:

- 1) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pengelolaan Asrama Donohudan;
- 2) menyusun rencana teknis operasional di bidang Pemeliharaan, Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan;
- 3) mengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan;
- 4) melaksanakan pemberdayaan dan optimalisasi aset asrama Donohudan melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
- 5) melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
- 6) melaksanakan pengelolaan sarana prasarana asrama Donohudan;
- 7) melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan asrama Donohudan
- 8) menyusun evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B, terdiri atas:

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Subbagian Tata Usaha; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 159 pegawai, 126 orang ASN dan 33 orang Non ASN, dengan komposisi jumlah pegawai berdasarkan golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 2.5 dan 2.6 berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Per Bulan Agustus 2025

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	1	2	3
2	Golongan II	4	2	6
3	Golongan III	47	34	81
4	Golongan IV	13	10	23
5	PPPK	8	5	13
Jumlah		73	53	126

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di BPKAD
Per Bulan Agustus 2025

No.	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	1	2	3	-	-	-	3
2	SMP Sederajat	2	-	2	1	-	1	3
3	SMA Sederajat	13	-	13	13	2	15	28
4	D1	-	-	-	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-	-	-
6	D3	3	3	6	3	1	4	10
7	D4	6	4	10	-	-	-	10
8	S1	28	24	52	7	5	12	64
9	S2	20	20	40	-	1	1	41
10	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		73	53	126	24	9	33	159

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah per Agustus 2025

KODE OBJEK	NAMA BARANG	PER AGUSTUS 2025	
		JML	HARGA
1.3.1	Tanah	7	55,767,500,000.00
1.3.1.01	Tanah	7	55,767,500,000.00
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	8,108	53,248,761,234.00
1.3.2.01	Alat Besar	44	2,568,329,860.00
1.3.2.02	Alat Angkutan	118	12,027,022,138.00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,119	26,563,332,845.00
1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	192	3,341,770,374.00
1.3.2.10	Alat Komputer	575	8,628,306,017.00
1.3.2.18	Rambu-rambu	60	120,000,000.00
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	62	82,701,154,912.00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	35	79,472,351,743.00
1.3.3.02	Monumen	1	846,935,000.00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	26	2,381,868,169.00
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	7	1,434,138,094.00
1.3.4.02	Bangunan Air	1	597,128,465.00
1.3.4.03	Instalasi	5	382,553,273.00
1.3.4.04	Jaringan	1	454,456,356.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	44	9,178,000.00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	42	9,078,000.00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	2	100,000.00
TOTAL		8,228	193,160,732,240

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BPKAD pada tahun 2020-2024 yang didasarkan pada sasaran/target Renstra BPKAD dituangkan dalam tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024. Selama periode tahun

2020-2024 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja dari dokumen Renstra BPKAD 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Perubahan indikator kinerja tersebut terdapat pada indikator kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sedangkan untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah pada pengelolaan keuangan dan barang milik daerah tidak terdapat perubahan.

Indikator kinerja lama tujuan perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” pada Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 berubah menjadi “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” pada RPD BPKAD Tahun 2024-2026. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” pada Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 berubah menjadi “Indeks Manajemen Risiko” pada RPD BPKAD Tahun 2024-2026.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 2.8 pada tahun 2024 hampir semua indikator kinerja tercapai 100% kecuali untuk indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Indikator Kinerja Tujuan. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dilakukan melalui pendampingan, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi kepada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan *stakeholders* di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada indikator kinerja sasaran masih belum tercapai 100% atau hanya tercapai 96,41% namun demikian BPKAD optimis pada akhir tahun Renstra 2025-2030 akan tercapai 100% karena BPKAD telah mengusahakan perbaikan pada sisi perencanaan dan evaluasi kinerja BPKAD.

Indikator kinerja Persentase Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan pada indikator kinerja program perangkat daerah yang pada tahun 2022 tercapai 99,05% meskipun pada tahun-tahun sebelumnya, dan di Tahun 2024 telah tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pada salah satu tahapan penyusunan APBD pada Kabupaten Tegal di Tahun 2023 dan Kabupaten Demak di Tahun 2024 sehingga tidak dilakukan evaluasi pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten yang bersangkutan. Namun demikian, BPKAD Provinsi Jawa Tengah juga optimis pada pelaksanaan tahun Renstra 2025-2029, indikator kinerja tersebut akan tercapai 100%. Hal ini diintervensi melalui asistensi dan monitoring terhadap tahapan penyusunan APBD Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi keterlambatan penyusunan APBD Kabupaten/Kota.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Renstra PD Tahun 2018-2023																			
1	Tujuan PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah	%	n.a.	n.a.	n.a.	65	67,50	70	72,50	-	70,23	72,84	77,20	68	-	108,05	107,91	110,29	93,79	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	n.a.	n.a.	n.a.	80	80	80	80	-	81	82,93	81,25	82,25	-	101,25	103,66	101,56	102,81	-
2	Sasaran PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	65	67,50	70	72,50	-	70,23	72,84	77,20	68	-	108,05	107,91	110,29	93,79	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka	n.a.	n.a.	n.a.	80	80	80	80	-	81	82,93	81,25	82,25		101,25	103,66	101,56	102,81	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	n.a.	n.a.	n.a.	77	80	80	80	-	72,16	76,68	79,41	77,65	-	93,71	95,85	99,26	97,06	-
3	Program PD																			
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	99,05	99,05	-	100	100	99,05	99,05	-
	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	n.a	100	100	-	n.a	n.a	100	100	-	n.a	n.a	100	100	-
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase realisasi serapan APBD	%	n.a.	n.a.	n.a.	92	92	92	95	-	93,70	94,28	98,65	93,85	-	101,85	102,48	107,23	98,79	-
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	65	67,50	70	72,50	-	70,23	72,84	77,20	68	-	108,05	107,91	110,29	93,79	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
B	Renstra PD Tahun 2024-2026																			
1	Tujuan PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	97,75	-	-	-	-	97,97	-	-	-	-	100,23
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	angka	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	76	-	-	-	-	73,27	-	-	-	-	96,41
2	Sasaran PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	93,25	-	-	-	-	93,25	-	-	-	-	100
	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	81	-	-	-	-	82,50	-	-	-	-	101,85
	Indeks Manajemen Risiko	angka	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	2,86	-	-	-	-	110
3	Program PD																			
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	tersusun tepat waktu																			
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	100
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	n.a.	172.112.520	8.641.595.508	9.040.602.293	8.403.072.922	101.715.578	172.112.520	8.661.336.514	9.040.203.549	9.453.165.465	122.433.107,88	88.737.499,44	8.538.291.783	9.111.132.508	9.491.525.186	120,37	51,56	98,58	100,78	100,41	9.193,72	7.652,42
2	Belanja	23.920.701	62.863.066	8.990.319.401	8.778.666.193	10.303.524.793	57.392.180	43.341.801	8.948.185.240	9.907.124.939	10.306.465.680	51.984.416,54	41.288.392,12	8.827.333.683	9.186.000.151	9.436.340.517	90,58	95,26	98,65	92,72	91,56	17.857,96	18.052,25
3	Pembiayaan	n.a.	350.000.000	286.128.777	572.200.000	1.378.000.000	-	-	1.018.692.885	572.200.000	1.336.055.820	-	-	1.018.692.884	1.330.599.603	485.169.400	-	-	100,00	232,54	36,31	31,15	-52,37

Catatan: perhitungan rata-rata pertumbuhan pembiayaan menggunakan anggaran dan realisasi dari tahun 2022-2024 karena tidak ada alokasi anggaran pada tahun 2020-2021

Pada tabel 2.9, bahwa terdapat kenaikan cukup besar pada komponen Pendapatan dan Belanja karena sejak tahun 2022 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dialokasikan pada anggaran BPKAD. Pengalokasian tersebut merupakan alokasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah dan Desa, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Pegelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAD disajikan pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Dinamika regulasi terkait pelayanan perangkat daerah
			Kualitas SDM pelayanan yang kurang memadai
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam perencanaan dan evaluasi kinerja
			Dinamika regulasi terkait pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Kualitas SDM pengelola keuangan yang kurang memadai
		Dinamika proses penyusunan APBD	Penyusunan APBD memerlukan kematangan perencanaan, sehingga kesalahan dalam menginput dokumen perencanaan akan berdampak pada proses penyusunan APBD
			Penyusunan APBD dipengaruhi berbagai aspek kebijakan baik pusat maupun daerah seperti kebijakan alokasi, <i>tools</i> penganggaran dan dinamika politik yang berkembang
			SDM yang mempengaruhi waktu penyusunan APBD
		Masih terdapat koreksi dalam proses penyusunan LKPD	Beragamnya persepsi terkait pelaksanaan dan kebijakan pelaporan APBD
			Dinamika regulasi dan penggunaan <i>Tools</i> penganggaran dan pelaporan APBD (SIPD)
		Regulasi pembayaran transaksi non tunai (TNT) dan manajemen kas Pemerintah Daerah	Dinamika regulasi dan penggunaan <i>Tools</i> penatausahaan APBD (SIPD)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD belum optimal
			Perencanaan dan pemanfaatan BMD belum mendasar pada ketersediaan dan kebutuhan BMD
		Pemahaman pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang kurang memadai	Laporan BMD tidak tepat waktu dan kurang valid karena belum optimalnya pengurus dan pengguna barang
			Pengamanan BMD secara <i>Yuridis</i> masih terkendala karena tidak lengkapnya dokumen kepemilikan

2.5. Penentuan Isu-isu Strategis

2.5.1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah “JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045” yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

- 1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
- 2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
- 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
- 5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
- 6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Penerjemahan visi dan misi daerah tersebut menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dimana tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah "JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN" dan akan diwujudkan melalui 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis;
- 2. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;

3. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Mendasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di atas, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi pembangunan ke tiga yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas” dan sasaran ke satu yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis”.

Berdasarkan pada telaahan di atas, maka didapatkan isu-isu strategis pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1. Pengamanan yuridis atas barang milik daerah (BMD) yang belum optimal
- 2. Semakin sempitnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi dikarenakan kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah.
- 3. tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

Tabel 2.11
Perumusan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1.Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	1.Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	1. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 2. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Pengamanan yuridis atas barang milik daerah (BMD) yang belum optimal 2. Semakin sempitnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi dikarenakan kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. 3. tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan;
2. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; dan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	-	97,75	97,8	97,85	97,9	97,95	98	98,05	98,05
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Realisasi APBD	%	93	93,2	94	94,2	94,4	94,6	94,8	95	95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
			dan Sasaran		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset daerah		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	%	-	3,24	3,08	3,12	3,16	3,2	3,24	3,28	3,28
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	-	76	76	76	76	76	76	76	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	81	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	-	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,9

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui:

- 1. Melakukan penguatan proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan, penyajian dan analisis pelaporan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 2. Evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin tata kelola keuangan serta sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3. Melakukan penguatan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) serta menjalankan mitigasi atas pengelolaan BMD melalui penguatan perencanaan dan penatausahaan BMD;
- 4. Meningkatkan kapasitas pegawai serta penguatan skala prioritas kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan akuntabilitas kinerja; dan
- 5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi dalam rangka mendukung pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional, maka dirumuskan arah kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang- undangan	Melakukan penguatan kebijakan pengamanan BMD secara berkesinambungan	1. Optimalisasi SIM ASET (perencanaan, penatausahaan, pemberdayaan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD). 2. Koordinasi dengan Bappeda dalam rangka pendanaan pengamanan di masing-masing OPD.
		Menjalankan mitigasi atas pengelolaan BMD dengan melakukan penguatan perencanaan dan	1. Penguatan kapasitas pengelolaan Barang Milik Daerah baik pada aset pengelola maupun pengguna.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penatausahaan BMD sebagai tindak lanjut inventarisasi/sensus BMD	2. Melakukan penguatan tata kelola perencanaan BMD, yang terintegrasi dengan menekankan perencanaan kebutuhan BMD yang berbasis kebutuhan riil dan mengacu pada hasil inventarisasi. 3. Peningkatan akurasi dan kualitas penatausahaan BMD melalui verifikasi dan validasi atas hasil pengadaan, perolehan lain yang sah dan hasil inventarisasi BMD secara akurat. 4. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan atas pengelolaan BMD dengan mengintegrasikan indikator pengelolaan aset dalam rencana strategis.
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Melakukan penguatan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Melakukan optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. 2. Melakukan pembinaan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten / Kota.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap keselarasan APBD Kabupaten / Kota secara tersistem. 4. Meningkatkan kualitas Belanja Daerah baik tingkat SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota. 5. Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah secara vertikal dan horisontal.
		Penyajian dan analisis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah serta penyampaian informasi data keuangan daerah melalui penguatan sistem keuangan daerah yang terintegrasi secara transparan dan akuntabel.	1. Optimalisasi implementasi dan integrasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Penguatan penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah melalui sinergitas mulai tahap perencanaan sampai pengawasan. 3. Melakukan pembinaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten / Kota. 4. Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pusat dan Kabupaten / Kota.
		Menjaga dan menciptakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui penyusunan kebijakan-kebijakan keuangan daerah	Penyusunan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
		Pembinaan dan evaluasi pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	1. Melakukan pembinaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten / Kota. 2. Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten / Kota.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Melakukan penguatan perbendaharaan dan kas daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah.	1. Memperkuat tata kelola perbendaharaan dan kas daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel melalui keselarasan dokumen anggaran dengan realisasi APBD, pemanfaatan teknologi digital dalam penatausahaan keuangan, pemantauan berkelanjutan terhadap penatausahaan OPD, optimalisasi manajemen kas agar dana tersedia tepat waktu, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain.
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Peningkatan perencanaan dan evaluasi dalam rangka mendukung kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Optimalisasi manajemen risiko dalam rangka mendukung perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah. 2. Memperkuat kapasitas SDM dalam rangka perencanaan dan evaluasi layanan Perangkat Daerah.
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat komputerisasi dan diklat persandian	1. Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi pegawai yang akan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			mengikuti diklat dimaksud. 2. Memberdayakan kemampuan pegawai sesuai dengan diklat yang telah diikuti.
		Membuat skala prioritas kebutuhan administrasi perkantoran	Memberikan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan.
		Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan percepatan infomasi Belanja dan Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE untuk mewujudkan tata kelola keuangan SKPKD yang bersih, transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. 2. Penguatan kapasitas SDM dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penunjang terkait keuangan SKPKD.

Tahapan prioritas pembangunan tahunan BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan diatas, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi data hasil inventarisasi	Penguatan penggunaan dan pemanfaatan	Penguatan dan penerapan pengamanan	Integrasi data BMD dari SIM Aset dengan	Evaluasi capaian pengelolaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
BMD guna penyusunan perencanaan dan pengamanan BMD yang efektif	aplikasi SIM aset dalam pengeloaan BMD secara luas	BMD secara aktif dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> terkait	sistem perencanaan program dan kegiatan	BMD dan reformulasi arah pengelolaan BMD
Menyelaraskan dokumen anggaran, serta melakukan penguatan kebijakan penatausahaan dan realisasi APBD, serta pembinaan pelaporan pertanggungja- waban keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten / Kota	Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten / Kota serta pembinaan terhadap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten / Kota	Peningkatan kualitas kebijakan- kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta melakukan optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi dan integrasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah baik tingkat SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota	Implementasi Transformasi digital penatausahaan keuangan daerah dengan penguatan penyajian Laporan Pertanggungja- waban Keuangan Pemerintah Daerah melalui sinergitas seluruh tahapan mulai perencanaan sampai pengawasan

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berupaya melaksanakan amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah melakukan identifikasi risiko serta merumuskan rencana pengendalian risiko, melaksanakan rencana pegendalian risiko. Untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	Keterlambatan atau kekurangan dana yang disalurkan untuk kegiatan OPD	5	Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak akurat dalam proyeksi biaya	Kegiatan OPD terhambat, keterlambatan dalam pencairan dana, dan ketidakmampuan mencapai target program		Kepala BPKAD	
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Efisiensi anggaran	5	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik		Kepala BPKAD	
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase Realisasi APBD	SP2D ditandatangani terlambat	5	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut		Bidang Perbendaharaan dan Kasda	

Tujuan / Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	5	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer		Bidang Akuntansi	
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indek Pengelolaan Aset (IPA)	Aset dikuasai atau dimanfaatkan pihak luar tanpa izin	5	Kurangnya pengawasan fisik dan pengamanan yuridis atas BMD	Kehilangan atau kerusakan BMD, penyalahgunaan aset		Kepala BPKAD	
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	5	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data		Bidang Aset Daerah	
Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gaji pegawai kurang	5	Kesalahan perhitungan gaji pegawai	Penundaan pembayaran gaji dan / atau revisi anggaran		Sekretariat	

Tujuan / Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	5	Ketidakcermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan		Sekretariat	
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	5	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran		Sekretariat	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Subbab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada BPKAD. Penentuan program dan kegiatan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan diuraikan dan dijelaskan secara naratif, untuk kemudian dituangkan dalam tabel 4.1.

Selain penjabaran dan penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam subbab ini juga dijelaskan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Uraian sub kegiatan yang dilaksanakan BPKAD dalam rangka mendukung program prioritas daerah kemudian dituangkan dalam tabel 4.1.

Adapun rencana program, kegiatan, dan pendanaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun 2024 (Realis asi)	Baseli ne Tahun 2025 (Targe t)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkat kan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegrit as dan dinamis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah *												48.702.967.0 00		53.098.371.0 00		57.548.292.0 00		61.083.515.0 00		66.282.379.2 50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah *	Angka	76	76	76		76		76		76		76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkat nya kualitas pengelolaa n risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **											993.405.000		1.043.073.00 0		1.188.203.00 0		1.313.614.00 0		1.380.294.25 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **	Angka	2.6	2.65	2.7	993.405.000	2.75	1.043.073.00 0	2.8	1.188.203.00 0	2.85	1.313.614.00 0	2.9	1.380.294.25 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI ***									993.405.000		1.043.073.00 0		1.188.203.00 0		1.313.614.00 0		1.380.294.25 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ***	%	100	100	100	993.405.000	100	1.043.073.00 0	100	1.188.203.00 0	100	1.313.614.00 0	100	1.380.294.25 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****								993.405.000		1.043.073.00 0		1.188.203.00 0		1.313.614.00 0		1.380.294.25 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	993.405.000	100	1.043.073.00 0	100	1.188.203.00 0	100	1.313.614.00 0	100	1.380.294.25 0	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							469.115.000		492.570.000		570.500.000		631.525.000		663.101.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	8	9	8	469.115.000	8	492.570.000	8	570.500.000	8	631.525.000	9	663.101.250	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							263.334.000		276.500.000		330.000.000		380.000.000		400.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	1	1	1	263.334.000	1	276.500.000	1	330.000.000	1	380.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							130.478.000		137.002.000		143.852.000		151.045.000		158.597.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup *****	Data	N/A	N/A	1	130.478.000	1	137.002.000	1	143.852.000	1	151.045.000	1	158.597.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							130.478.000		137.001.000		143.851.000		151.044.000		158.596.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	130.478.000	1	137.001.000	1	143.851.000	1	151.044.000	1	158.596.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **											47.709.562.000		52.055.298.000		56.360.089.000		59.769.901.000		64.902.085.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **	Angka	81	81	81.5	47.709.562.000	82	52.055.298.000	82.5	56.360.089.000	83	59.769.901.000	83.5	64.902.085.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									41.607.160.000		44.893.582.000		48.371.323.000		51.381.696.000		55.830.910.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ***	%	100	100	100	41.607.160.000	100	44.893.582.000	100	48.371.323.000	100	51.381.696.000	100	55.830.910.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *****								32.080.973.000		33.808.088.000		35.467.074.000		37.338.541.000		39.175.597.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *****	Dokumen	1	1	1	32.080.973.000	1	33.808.088.000	1	35.467.074.000	1	37.338.541.000	1	39.175.597.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							30.029.946.000		31.586.227.000		33.134.120.000		34.822.770.000		36.534.038.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	150	150	150	30.029.946.000	150	31.586.227.000	150	33.134.120.000	150	34.822.770.000	150	36.534.038.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							1.744.492.000		1.900.000.000		1.995.000.000		2.094.750.000		2.199.487.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	1	1.744.492.000	1	1.900.000.000	1	1.995.000.000	1	2.094.750.000	1	2.199.487.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							158.800.000		166.740.000		175.077.000		250.000.000		262.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	158.800.000	1	166.740.000	1	175.077.000	1	250.000.000	1	262.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							147.735.000		155.121.000		162.877.000		171.021.000		179.572.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	4	4	4	147.735.000	4	155.121.000	4	162.877.000	4	171.021.000	4	179.572.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *****								200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.250	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.250	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *****								105.000.000		110.250.000		115.762.000		121.550.000		127.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *****	%	100	100	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.000	100	121.550.000	100	127.628.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	127	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						105.000.000		110.250.000		115.762.000		121.550.000		127.628.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	10	5	5	105.000.000	5	110.250.000	5	115.762.000	5	121.550.000	5	127.628.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah *****							2.495.042.000		2.619.793.000		2.914.826.000		3.120.566.000		3.276.595.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	100	100	2.495.042.000	100	2.619.793.000	100	2.914.826.000	100	3.120.566.000	100	3.276.595.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.000		255.256.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	210.000.000	4	220.500.000	4	231.525.000	4	243.101.000	4	255.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						603.250.000		633.412.000		665.083.000		698.337.000		733.254.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		

						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	20	20	603.250.000	20	633.412.000	20	665.083.000	20	698.337.000	20	733.254.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							262.500.000		275.625.000		350.000.000		367.500.000		385.875.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	25	25	262.500.000	25	275.625.000	25	350.000.000	25	367.500.000	25	385.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							262.500.000		275.625.000		289.406.000		303.876.000		319.070.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	10	10	262.500.000	10	275.625.000	10	289.406.000	10	303.876.000	10	319.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							315.000.000		330.750.000		347.287.000		364.651.000		382.884.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	315.000.000	1	330.750.000	1	347.287.000	1	364.651.000	1	382.884.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							631.792.000		663.381.000		800.000.000		900.000.000		945.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	631.792.000	1	663.381.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	945.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.000		255.256.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokume n	1	1	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.000	1	255.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *****								262.750.000		275.887.000		644.100.000		730.000.000		766.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Unit	N/A	10	15	262.750.000	30	275.887.000	30	644.100.000	30	730.000.000	30	766.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							40.000.000		42.000.000		44.100.000		100.000.000		105.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	10	10	40.000.000	10	42.000.000	10	44.100.000	10	100.000.000	10	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							222.750.000		233.887.000		600.000.000		630.000.000		661.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	10	10	222.750.000	10	233.887.000	10	600.000.000	10	630.000.000	10	661.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****								4.713.395.000		5.549.064.000		6.244.061.000		6.606.264.000		6.936.576.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	1	1	1	4.713.395.000	1	5.549.064.000	1	6.244.061.000	1	6.606.264.000	1	6.936.576.750	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							10.500.000		11.025.000		11.576.000		12.155.000		12.762.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.000	1	12.155.000	1	12.762.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							682.500.000		716.625.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.155.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	682.500.000	1	716.625.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.000		255.256.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.000	1	255.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						3.810.395.000		4.600.914.000		5.000.960.000		5.251.008.000		5.513.558.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	3.810.395.000	1	4.600.914.000	1	5.000.960.000	1	5.251.008.000	1	5.513.558.750	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.750.000.000		2.320.500.000		2.765.000.000		3.233.250.000		5.304.912.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
					Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	50	50	50	1.750.000.000	50	2.320.500.000	50	2.765.000.000	50	3.233.250.000	50	5.304.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						1.160.000.000		1.300.000.000		1.365.000.000		1.433.250.000		3.104.912.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	40	40	1.160.000.000	40	1.300.000.000	40	1.365.000.000	40	1.433.250.000	40	3.104.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							210.000.000		220.500.000		400.000.000		600.000.000		800.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	20	20	210.000.000	20	220.500.000	20	400.000.000	20	600.000.000	20	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							380.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	8	8	380.000.000	8	800.000.000	8	1.000.000.000	8	1.200.000.000	8	1.400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									6.102.402.000		7.161.716.000		7.988.766.000		8.388.205.000		9.071.175.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelola Asrama Donohudan Kelas B	

						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan ***	%	81	81	81.5	6.102.402.000	82	7.161.716.000	82.5	7.988.766.000	83	8.388.205.000	83.5	9.071.175.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								561.225.000		589.286.000		618.749.000		649.687.000		682.170.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	80	81	81.5	561.225.000	82	589.286.000	82.5	618.749.000	83	649.687.000	83.5	682.170.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							105.000.000		110.250.000		115.762.000		121.550.000		127.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	105.000.000	4	110.250.000	4	115.762.000	4	121.550.000	4	127.628.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							214.725.000		225.461.000		236.734.000		248.571.000		260.999.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	35000	4	4	214.725.000	4	225.461.000	4	236.734.000	4	248.571.000	4	260.999.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							63.000.000		66.150.000		69.457.000		72.930.000		76.576.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	63.000.000	1	66.150.000	1	69.457.000	1	72.930.000	1	76.576.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							178.500.000		187.425.000		196.796.000		206.636.000		216.967.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	178.500.000	1	187.425.000	1	196.796.000	1	206.636.000	1	216.967.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *****								36.750.000		38.587.000		40.516.000		42.542.000		44.669.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	20	36.750.000	20	38.587.000	20	40.516.000	20	42.542.000	20	44.669.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							36.750.000		38.587.000		40.516.000		42.542.000		44.669.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	36.750.000	N/A	38.587.000	N/A	40.516.000	N/A	42.542.000	N/A	44.669.000	Unit Pengelolaan Asrama	JAWA TENGAH OPD Provinsi

																					Donohudan Kelas B		
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						0		0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							3.629.026.000		3.810.477.000		4.001.000.000		4.201.050.000		4.411.102.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B		
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	3.629.026.000	N/A	3.810.477.000	N/A	4.001.000.000	N/A	4.201.050.000	N/A	4.411.102.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.260.000		1.323.000		1.389.000		1.458.000		1.531.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama		

																					Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.260.000	1	1.323.000	1	1.389.000	1	1.458.000	1	1.531.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08. 0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						1.228.500.00 0		1.289.925.00 0		1.354.421.00 0		1.422.142.00 0		1.493.249.00 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B		
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	1.228.500.00 0	1	1.289.925.00 0	1	1.354.421.00 0	1	1.422.142.00 0	1	1.493.249.00 0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08. 0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						2.399.266.00 0		2.519.229.00 0		2.645.190.00 0		2.777.450.00 0		2.916.322.00 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B		
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	2.399.266.00 0	1	2.519.229.00 0	1	2.645.190.00 0	1	2.777.450.00 0	1	2.916.322.00 0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah *****							1.875.401.00 0		2.723.366.00 0		3.328.501.00 0		3.494.926.00 0		3.933.234.00 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B		
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *****	Unit	730	730	730	1.875.401.00 0	730	2.723.366.00 0	730	3.328.501.00 0	730	3.494.926.00 0	730	3.933.234.00 0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	

		X.XX.01.1.09. 0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							139.230.000		146.191.000		153.501.000		161.176.000		169.234.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	15	15	15	139.230.000	15	146.191.000	15	153.501.000	15	161.176.000	15	169.234.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09. 0005			Pemeliharaan Mebel *****							73.500.000		77.175.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	350	350	350	73.500.000	350	77.175.000	350	200.000.000	350	210.000.000	350	220.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09. 0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							842.421.000		1.000.000.00 0		1.400.000.00 0		1.470.000.00 0		1.543.500.00 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	350	350	350	842.421.000	350	1.000.000.00 0	350	1.400.000.00 0	350	1.470.000.00 0	350	1.543.500.00 0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		X.XX.01.1.09. 0011			Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							820.250.000		1.500.000.00 0		1.575.000.00 0		1.653.750.00 0		2.000.000.00 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	

						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	15	15	15	820.250.000	15	1.500.000.000	15	1.575.000.000	15	1.653.750.000	15	2.000.000.000	Unit Pengelola Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah *												7.270.161.584.000		7.532.612.312.000		8.210.864.884.000		8.843.843.726.000		9.477.252.763.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah *	%	97.75	97.8	97.85		97.9		97.95		98		98.05		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan **											7.270.161.584.000		7.532.612.312.000		8.210.864.884.000		8.843.843.726.000		9.477.252.763.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Persentase realisasi APBD **	%	93.2	94	94.2	3.503.335.000	94.4	3.767.435.000	94.6	3.955.806.000	94.8	4.849.008.000	95	5.286.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									3.503.335.000		3.767.435.000		3.955.806.000		4.849.008.000		5.286.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel ***	%	100	100	100	3.503.335.000	100	3.767.435.000	100	3.955.806.000	100	4.849.008.000	100	5.286.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah ****								2.374.700.000		2.493.432.000		2.618.103.000		2.749.008.000		2.886.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	

						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas	Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang telah disusun ****	Dokumen	1	1	1	913.346.000	1	959.012.000	1	1.006.963.000	1	1.057.311.000	1	1.110.177.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah *****							365.338.000		383.604.000		402.785.000		422.924.000		444.070.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah *****	Dokumen	41	41	4	365.338.000	4	383.604.000	4	402.785.000	4	422.924.000	4	444.070.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait *****							548.008.000		575.408.000		604.178.000		634.387.000		666.107.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait *****	Dokumen	49	49	3	548.008.000	3	575.408.000	3	604.178.000	3	634.387.000	3	666.107.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
						Terlaksananya pembinaan penatausahaan dalam penyusunan dokumen anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD ****	Dokumen	N/A	N/A	2	756.773.000	2	794.611.000	2	834.341.000	2	876.058.000	2	919.862.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD *****							548.008.000		575.408.000		604.178.000		634.387.000		666.107.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	

						Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD *****	Dokume n	4	4	4	548.008.000	4	575.408.000	4	604.178.000	4	634.387.000	4	666.107.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	Bidang Perbendahara an dan Kas Daerah
		5.02.02.1.03. 0011			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota *****							208.765.000		219.203.000		230.163.000		241.671.000		253.755.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaa n dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	N/A	70	208.765.000	70	219.203.000	70	230.163.000	70	241.671.000	70	253.755.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	Bidang Perbendahara an dan Kas Daerah
						Tersusunnya Juknis dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai *****	Dokume n	N/A	N/A	2	704.581.000	2	739.809.000	2	776.799.000	2	815.639.000	2	856.422.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	
		5.02.02.1.03. 0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank *****							548.008.000		575.408.000		604.178.000		634.387.000		666.107.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaa n dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank *****	Dokume n	43	43	2	548.008.000	2	575.408.000	2	604.178.000	2	634.387.000	2	666.107.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	Bidang Perbendahara an dan Kas Daerah

		5.02.02.1.03.0010			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan *****							156.573.000		164.401.000		172.621.000		181.252.000		190.315.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan *****	Dokumen	N/A	N/A	2	156.573.000	2	164.401.000	2	172.621.000	2	181.252.000	2	190.315.000		Pokja Penatausahaan Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah *****								1.128.635.000		1.274.003.000		1.337.703.000		2.100.000.000		2.400.000.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Jumlah Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan *****	Dokumen	2	2	2	1.128.635.000	2	1.274.003.000	2	1.337.703.000	2	2.100.000.000	2	2.400.000.000		Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah *****							867.679.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	

						Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah *****	Dokumen	1	2	2	867.679.000	2	1.000.000.000	2	1.050.000.000	2	1.500.000.000	2	1.600.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.1.06.0003			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi *****							260.956.000		274.003.000		287.703.000		600.000.000		800.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi *****	Orang	N/A	N/A	49	260.956.000	49	274.003.000	49	287.703.000	49	600.000.000	49	800.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
							Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan **	%	100	100	100	7.262.123.728.000	100	7.523.816.660.000	100	8.201.629.450.000	100	8.832.841.491.000	100	9.465.415.412.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									7.253.508.065.000		7.514.486.815.000		8.191.833.114.000		8.822.199.477.000		9.454.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersusunnya dokumen belanja transfer APBD Provinsi tepat waktu	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu ***	%	100	100	100	7.253.508.065.000	100	7.514.486.815.000	100	8.191.833.114.000	100	8.822.199.477.000	100	9.454.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah *****								7.253.508.065.000		7.514.486.815.000		8.191.833.114.000		8.822.199.477.000		9.454.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT	Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun *****	Dokumen	1	1	1	7.253.508.065.000	1	7.514.486.815.000	1	8.191.833.114.000	1	8.822.199.477.000	1	9.454.061.296.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan *****							2.828.139.837.000		2.740.777.148.000		3.041.182.159.000		3.263.625.564.000		3.454.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan *****	Laporan	1	1	1	2.828.139.837.000	1	2.740.777.148.000	1	3.041.182.159.000	1	3.263.625.564.000	1	3.454.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak *****							25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak *****	Laporan	1	1	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi *****							4.400.368.228.000		4.748.709.667.000		5.125.650.955.000		5.533.573.913.000		5.975.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi *****	Laporan	1	1	1	4.400.368.228.000	1	4.748.709.667.000	1	5.125.650.955.000	1	5.533.573.913.000	1	5.975.061.296.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									8.615.663.000		9.329.845.000		9.796.336.000		10.642.014.000		11.354.116.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu ***	%	100	100	100	8.059.228.000	100	8.745.590.000	100	9.182.869.000	100	9.642.014.000	100	10.124.116.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
		5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah *****								8.059.228.000		8.745.590.000		9.182.869.000		9.642.014.000		10.124.116.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku *****	Dokumen	2	2	2	6.587.235.000	2	7.200.000.000	2	7.560.000.000	2	7.938.000.000	2	8.334.900.000	Pokja Penyusunan Anggaran	

		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD *****						4.098.780.000		4.400.000.000		4.620.000.000		4.851.000.000		5.093.550.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD *****	Dokumen	2	2	2	4.098.780.000	2	4.400.000.000	2	4.620.000.000	2	4.851.000.000	2	5.093.550.000	Pokja Penyusunan Anggaran	Bidang Anggaran
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD *****						2.488.455.000		2.800.000.000		2.940.000.000		3.087.000.000		3.241.350.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD *****	Dokumen	2	2	2	2.488.455.000	2	2.800.000.000	2	2.940.000.000	2	3.087.000.000	2	3.241.350.000	Pokja Penyusunan Anggaran	Bidang Anggaran
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku ****	Dokumen	2	2	2	292.270.000	2	306.882.000	2	322.226.000	2	338.338.000	2	355.256.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS *****						146.135.000		153.441.000		161.113.000		169.169.000		177.628.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun *****	Dokumen	2	2	2	146.135.000	2	153.441.000	2	161.113.000	2	169.169.000	2	177.628.000	Pokja Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran

		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS *****							146.135.000		153.441.000		161.113.000		169.169.000		177.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun *****	Dokumen	2	2	2	146.135.000	2	153.441.000	2	161.113.000	2	169.169.000	2	177.628.000	Pokja Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran
						Tersusunnya Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku *****	Laporan	2	2	2	875.275.000	2	919.038.000	2	964.990.000	2	1.013.240.000	2	1.063.902.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran *****							875.275.000		919.038.000		964.990.000		1.013.240.000		1.063.902.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran *****	Dokumen	2	2	2	875.275.000	2	919.038.000	2	964.990.000	2	1.013.240.000	2	1.063.902.000	Pokja Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran
						Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku *****	Laporan	N/A	N/A	105	304.448.000	105	319.670.000	105	335.653.000	105	352.436.000	105	370.058.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
		5.02.02.1.01.0013			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi *****							304.448.000		319.670.000		335.653.000		352.436.000		370.058.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi *****	Orang	N/A	N/A	105	304.448.000	105	319.670.000	105	335.653.000	105	352.436.000	105	370.058.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran

						Tersusunnya dokumen APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu ***	%	N/A	100	100	556.435.000	100	584.255.000	100	613.467.000	100	1.000.000.000	100	1.230.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
		5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ****								556.435.000		584.255.000		613.467.000		1.000.000.000		1.230.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun ****	Dokumen	70	70	70	556.435.000	70	584.255.000	70	613.467.000	70	1.000.000.000	70	1.230.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
		5.02.02.1.02.0002		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota *****								199.931.000		209.927.000		220.423.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota *****	Laporan	35	35	35	199.931.000	35	209.927.000	35	220.423.000	35	300.000.000	35	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran
		5.02.02.1.02.0003		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota *****								199.931.000		209.927.000		220.423.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	

						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota *****	Laporan	35	35	35	199.931.000	35	209.927.000	35	220.423.000	35	300.000.000	35	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran
		5.02.02.1.02.0011			Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota *****							156.573.000		164.401.000		172.621.000		400.000.000		600.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	N/A	35	156.573.000	35	164.401.000	35	172.621.000	35	400.000.000	35	600.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran
							Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun **	%	100	100	100	4.534.521.000	100	5.028.217.000	100	5.279.628.000	100	6.153.227.000	100	6.550.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									4.534.521.000		5.028.217.000		5.279.628.000		6.153.227.000		6.550.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersusunnya LKPD tepat waktu	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu ***	%	100	100	100	4.534.521.000	100	5.028.217.000	100	5.279.628.000	100	6.153.227.000	100	6.550.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
		5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota *****								696.152.000		730.958.000		767.506.000		1.200.000.000		1.260.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

						Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang disusun ****	Dokume n	35	35	35	696.152.000	35	730.958.000	35	767.506.000	35	1.200.000.000	35	1.260.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota *****							199.931.000		209.927.000		220.423.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota *****	Laporan	35	35	35	199.931.000	35	209.927.000	35	220.423.000	35	300.000.000	35	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.02.0005			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota *****							455.212.000		477.972.000		501.871.000		600.000.000		630.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

						Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi *****	Dokumen	1	1	1	455.212.000	1	477.972.000	1	501.871.000	1	600.000.000	1	630.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.02.0012			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah *****							41.009.000		43.059.000		45.212.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah *****	Dokumen	1	1	1	41.009.000	1	43.059.000	1	45.212.000	1	300.000.000	1	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah *****								3.838.369.000		4.297.259.000		4.512.122.000		4.953.227.000		5.290.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan *****	Dokumen	1	1	1	574.910.000	1	603.654.000	1	633.837.000	1	665.529.000	1	698.806.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban *****							373.491.000		392.165.000		411.773.000		432.362.000		453.980.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban *****	Dokumen	1	1	1	373.491.000	1	392.165.000	1	411.773.000	1	432.362.000	1	453.980.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *****							201.419.000		211.489.000		222.064.000		233.167.000		244.826.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi *****	Laporan	1	1	1	201.419.000	1	211.489.000	1	222.064.000	1	233.167.000	1	244.826.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran ****	Dokumen	1	1	1	1.121.285.00	1	1.177.349.000	1	1.236.216.000	1	1.298.026.000	1	1.362.928.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah *****							291.565.000		306.143.000		321.450.000		337.522.000		354.399.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah *****	Dokumen	1	1	1	291.565.000	1	306.143.000	1	321.450.000	1	337.522.000	1	354.399.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi

		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi *****							829.720.000		871.206.000		914.766.000		960.504.000		1.008.529.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi *****	Orang	41	41	41	829.720.000	41	871.206.000	41	914.766.000	41	960.504.000	41	1.008.529.000		Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan ****	Dokumen	1	1	1	2.142.174.000	1	2.516.256.000	1	2.642.069.000	1	2.989.672.000	1	3.229.156.000		Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi *****							1.460.025.000		1.800.000.000		1.890.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

						Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi *****	Dokumen	1	2	2	1.460.025.000	2	1.800.000.000	2	1.890.000.000	2	2.200.000.000	2	2.400.000.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD *****							682.149.000		716.256.000		752.069.000		789.672.000		829.156.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD *****	Dokumen	1	1	1	682.149.000	1	716.256.000	1	752.069.000	1	789.672.000	1	829.156.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah *												4.473.826.000		4.697.513.000		4.932.389.000		5.744.516.000		6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indek Pengelolaan Aset (IPA) *	Angka	3.24	3.08	3.12		3.16		3.2		3.24		3.28		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan **											4.473.826.000		4.697.513.000		4.932.389.000		5.744.516.000		6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

							Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan **	%	100	100	100	4.473.826.000	100	4.697.513.000	100	4.932.389.000	100	5.744.516.000	100	6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ***									4.473.826.000		4.697.513.000		4.932.389.000		5.744.516.000		6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif ***	%	N/A	50	50.5	1.330.745.000	51	1.397.282.000	51.5	1.467.145.000	52	1.740.672.000	52.5	1.827.705.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****								1.330.745.000		1.397.282.000		1.467.145.000		1.740.672.000		1.827.705.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	172.622.000	1	181.253.000	1	190.315.000	1	400.000.000	1	420.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0004		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah *****								172.622.000		181.253.000		190.315.000		400.000.000		420.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah *****	Dokumen	1	1	1	172.622.000	1	181.253.000	1	190.315.000	1	400.000.000	1	420.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Terlaksananya Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	1.158.123.000	1	1.216.029.000	1	1.276.830.000	1	1.340.672.000	1	1.407.705.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	

		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah *****						1.158.123.000		1.216.029.000		1.276.830.000		1.340.672.000		1.407.705.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
					Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah *****	Dokumen	3	3	3	1.158.123.000	3	1.216.029.000	3	1.276.830.000	3	1.340.672.000	3	1.407.705.000		Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
					Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Administrasi BMD yang Andal ***	%	N/A	70	70.5	1.057.256.000	71	1.110.118.000	71.5	1.165.624.000	72	1.223.905.000	72.5	1.285.100.750		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****							1.057.256.000		1.110.118.000		1.165.624.000		1.223.905.000		1.285.100.750		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
					Terlaksananya Sertifikasi BMD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertifikasi dan Pengamanan BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	1.057.256.000	1	1.110.118.000	1	1.165.624.000	1	1.223.905.000	1	1.285.100.750		Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah *****						1.057.256.000		1.110.118.000		1.165.624.000		1.223.905.000		1.285.100.750		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah *****	Laporan	1	1	1	1.057.256.000	1	1.110.118.000	1	1.165.624.000	1	1.223.905.000	1	1.285.100.750		Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
					Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan ***	%	N/A	100	100	1.329.575.000	100	1.396.052.000	100	1.465.855.000	100	1.727.410.000	100	1.813.780.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	

		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****								1.329.575.00 0		1.396.052.00 0		1.465.855.00 0		1.727.410.00 0		1.813.780.00 0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersusunnya dan penetapan dokumen RKBMD	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD ****	%	N/A	100	100	637.516.000	100	669.391.000	100	702.861.000	100	738.004.000	100	774.904.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01. 0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah *****							637.516.000		669.391.000		702.861.000		738.004.000		774.904.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah *****	Dokume n	42	42	42	637.516.000	42	669.391.000	42	702.861.000	42	738.004.000	42	774.904.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Tersusunnya dokumen Laporan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD ****	%	N/A	100	100	571.498.000	100	600.072.000	100	630.076.000	100	789.406.000	100	828.876.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01. 0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah *****							321.498.000		337.572.000		354.451.000		500.000.000		525.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah *****	Laporan	2	2	2	321.498.000	2	337.572.000	2	354.451.000	2	500.000.000	2	525.000.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
		5.02.03.1.01. 0011			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah *****							250.000.000		262.500.000		275.625.000		289.406.000		303.876.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah *****	Laporan	N/A	N/A	1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.000	1	303.876.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah

						Tersusunnya dokumen Laporan Pengawasan Pengendalian	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian ****	%	N/A	100	100	120.561.000	100	126.589.000	100	132.918.000	100	200.000.000	100	210.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah *****							120.561.000		126.589.000		132.918.000		200.000.000		210.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah *****	Laporan	41	42	42	120.561.000	42	126.589.000	42	132.918.000	42	200.000.000	42	210.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif ***	%	N/A	9.5	9	756.250.000	8.5	794.061.000	8	833.765.000	7.5	1.052.529.000	7	1.105.155.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah *****								756.250.000		794.061.000		833.765.000		1.052.529.000		1.105.155.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	756.250.000	1	794.061.000	1	833.765.000	1	1.052.529.000	1	1.105.155.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah *****							365.338.000		383.604.000		402.785.000		600.000.000		630.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah *****	Laporan	41	42	42	365.338.000	42	383.604.000	42	402.785.000	42	600.000.000	42	630.000.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah

		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah *****							390.912.000		410.457.000		430.980.000		452.529.000		475.155.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun *****	Laporan	84	84	84	390.912.000	84	410.457.000	84	430.980.000	84	452.529.000	84	475.155.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah

Tabel 4.2.

Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Percepatan penanganan <i>stunting</i> melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Pemberian PMT <i>Wasting</i>	Pemberian Makanan Tambahan untuk prevalensi <i>wasting</i> balita sebanyak 61.055 paket sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
		Pemberian PMT <i>Stunting</i>	Pemberian Makanan Tambahan untuk prevalensi <i>stunting</i> sebanyak 31.070 paket sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
		Pemberian PMT <i>Underweight</i>	Pemberian Makanan Tambahan untuk prevalensi <i>Underweight</i> sebanyak 98.450 sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
		Pemberian PMT Ibu Hamil KEK	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK sebanyak 213.115 paket sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
2	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan <i>sport center</i>)	Penyediaan bantuan alat olahraga	Penyediaan bantuan alat olahraga sebanyak 576 unit sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi	Penyediaan Anggaran untuk RTLH	Penyediaan anggaran untuk RTLH sebanyak 102.000 unit sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
	Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional					
4	Jambanisasi 100%	Pemberian Bantuan Jamban untuk masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan desa	50.000 unit sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
5	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Mengalokasikan anggaran untuk kenaikan belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	Pengalokasian anggaran untuk kenaikan belanja tambahan penghasilan pegawai sesuai regulasi pada Tahun ketiga	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bidang Anggaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengalokasian anggaran untuk kenaikan belanja tambahan penghasilan pegawai sesuai regulasi pada Tahun ketiga	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bidang Anggaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Sosialisasi Perda tentang Barang Milik Daerah	Pencapaian target retribusi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		Penyusunan dan Sosialisasi Pergub tentang Juklak/Juknis Perda	Pencapaian target retribusi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Aset	Pencapaian target retribusi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	n.a	97,75	97,8%	97,91%	97,9%	97,95%	98%	98,05%	98,05%
2	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	n.a	3,24	3,08	3,12	3,16	3,20	3,24	3,28	3,32
3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n.a	n.a	76	76	76	76	76	76	76

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	11,81%	13,22%	29,57%	32,55%	31,54%	29,91%	27,98%	26,11%	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	93,98%	97,54%	96,00%	96,25%	96,50%	96,75%	97,00%	97,25%	
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1,89%	0,12%	7,50%	3,68%	7,10%	6,81%	6,55%	7,59%	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	34,16%	11,20%	19,95%	14,08%	19,03%	18,77%	19,94%	22,02%	
5	Persentase Penurunan SILPA	37,36%	56,01%	-5,26%	-2,04%	-4,17%	-2,04%	-5,26%	-3,09%	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan strategis Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain:

1. Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Mengupayakan Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan melalui penyusunan kebijakan penganggaran yang merujuk pada visi misi, program prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang tercantum pada RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Meningkatkan persentase realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah melalui penguatan manajemen kas dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah secara akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui supervisi/pendampingan kepada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Meningkatkan persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan melalui

supervisi/pendampingan penyusunan RKBMD/RKPMD, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca BMD pada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Meningkatkan nilai indeks manajemen risiko perangkat daerah melalui penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah; dan
6. Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah melalui *survey* kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah kepada *stakeholder* terkait.

Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas Program dan Kegiatan agar dalam Implementasinya dapat diterapkan pada Tugas Pokok dan Fungsi sumber daya manusia (SDM) Aparatur yang ada dengan dukungan dana yang memadai, disertai komitmen seluruh elemen pendukung organisasi untuk Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi yang tercantum pada RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029.

Cascading Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Jawa Tengah

Dasar Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah

Dasar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Konversi IPA ke Dalam Indeks	
IPA	Indeks
3 < IPA ≤ 4	Sangat Baik
2 < IPA ≤ 3	Baik
1 < IPA ≤ 2	Cukup
IPA ≤ 1	Buruk

Target Tujuan di RPJMD

Mengukur kualitas tata kelola BMD melalui Indeks Pengelolaan Aset

2 < IPA ≤ 4

nilai IPA Baik/Sangat Baik mempertimbangkan dalam penilaian IPA tidak hanya tergantung pada upaya internal untuk melaksanakan Pengelolaan BMD, namun juga berdasarkan pada kinerja eksternal dalam melakukan penilaian (tjen/BPK) serta mendukung upaya pencapaian target dalam pengelolaan BMD (rantai)

TUJUAN

Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	=Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif+Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan+Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif+ Administrasi BMD yang Andal pada keseluruhan OPD
Indek Pengelolaan Aset (IPA)	

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Jumlah OPD yang mengelola Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi jumlah keseluruhan OPD
Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

SASARAN

Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD dibagi Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD x 70%)+(Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dibagi Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD x 30%)	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen rekamtu yang ditetapkan tepat waktu dibagi dengan dokumen RKMBD yang disusun x 100%)+(Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD semesteran tepat waktu dibagi Jumlah Pengguna Barang x 100%)+(Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan Laporan Pengawasan Pengendalian tepat waktu dibagi Jumlah Pengguna Barang x 100%)	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun sebelumnya dibagi Total jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan tahun sebelumnya x 43%)+(Jumlah BMD atas pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, penghapusan status penggunaan dan	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun sebelumnya dibagi Total jumlah bidang tanah sampai dengan tahun sebelumnya x 50%)+(Nilai perolehan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun sebelumnya dibagi Total nilai perolehan tanah sampai dengan tahun sebelumnya x 50%)
	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Naiknaik Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif		Tingkat Administrasi BMD yang Andal
Mengukur progres negatif Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif		Mengukur Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan		Mengukur Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif		Mengukur Administrasi BMD yang Andal	

KEGIATAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Tersusunnya dan penetapan dokumen RKMBD	Jumlah dokumen RKMBD yang ditetapkan tepat waktu dibagi dengan dokumen RKMBD yang disusun x 100%	Tersusunnya dokumen Laporan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	Tersusunnya dokumen Laporan Pengawasan Pengendalian	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	Terlaksananya Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Terlaksananya Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Terlaksananya Sertifikasi BMD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertifikasi dan Pengamanan BMD
	Mengukur pelaksanaan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD		Mengukur jumlah penetapan RKMBD yang tepat waktu		Mengukur jumlah laporan BMD semesteran diserahkan yang tepat		Mengukur jumlah Laporan Pengawasan Pengendalian diserahkan		Mengukur pelaksanaan Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI		Mengukur pelaksanaan Tindak lanjut Pengelolaan BMD		Mengukur pelaksanaan Sertifikasi BMD
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Penatausahaan Barang Milik Daerah		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah	
Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah		Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah		Kapokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah		Kapokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah		Kapokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
	Mengukur Hasil Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Mengukur Hasil Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan		Mengukur Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Mengukur Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian		Mengukur Hasil Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang		Mengukur Hasil Pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan,		Mengukur Hasil Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Inventarisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Inventarisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Inventarisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Inventarisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah		Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Mengukur Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah		Mengukur Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka		Mengukur Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka		Mengukur Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka		Mengukur Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka		Mengukur Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka		Mengukur Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka

SUB KEGIATAN

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	Risiko Operasional	Ketidacermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	BPKAD
2	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Risiko Operasional	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran	BPKAD
3	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	SP2D ditandatangani terlambat	Risiko Operasional	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut	OPD terkait
4	Sasaran Strategis	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Efisiensi anggaran	Risiko Strategis	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5	Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	Risiko Kepatuhan	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	Risiko Operasional	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

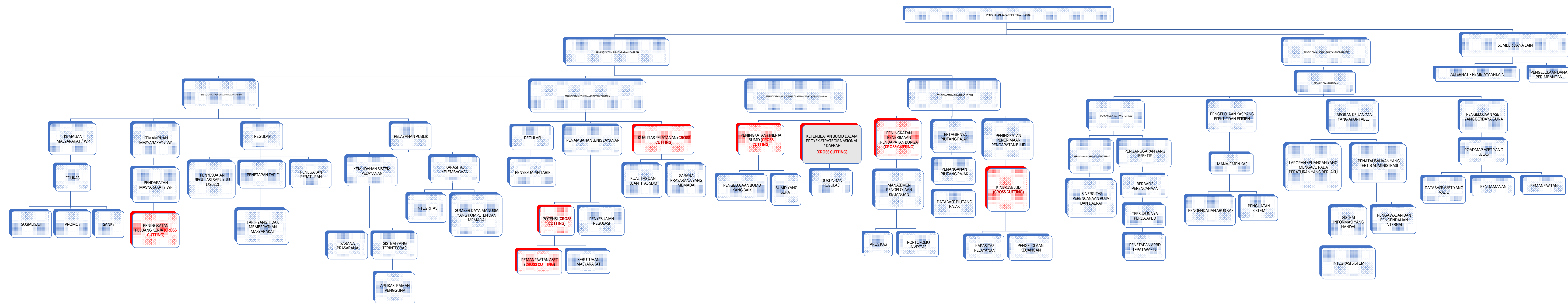
[illegible]

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pernyataan Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terdapat salah input anggaran dalam sistem	5	Sekretariat	Ketidakcermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	5	Sekretariat	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran
SP2D ditandatangani terlambat	5	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut
Efisiensi anggaran	5	Kepala BPKAD	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik
Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	5	Bidang Akuntansi	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer
Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	5	Bidang Aset Daerah	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	5	Ketidacermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan			
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	5	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	SP2D ditandatangani terlambat	5	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Efisiensi anggaran	5	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	5	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	5	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data			



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Slamet, Ak

NIP: 19660215 198603 1 001

Jabatan : Kepala Badan Berdasarkan SK
Gubernur Nomor 821.2/60/2022
Tanggal 11 Februari 2022 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.

Bertugas untuk dan atas nama Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl.
Sriwijaya No. 29 Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH




Slamet, Ak

Pembina Utama Madya

NIP. 19660215 198603 1 001



BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah